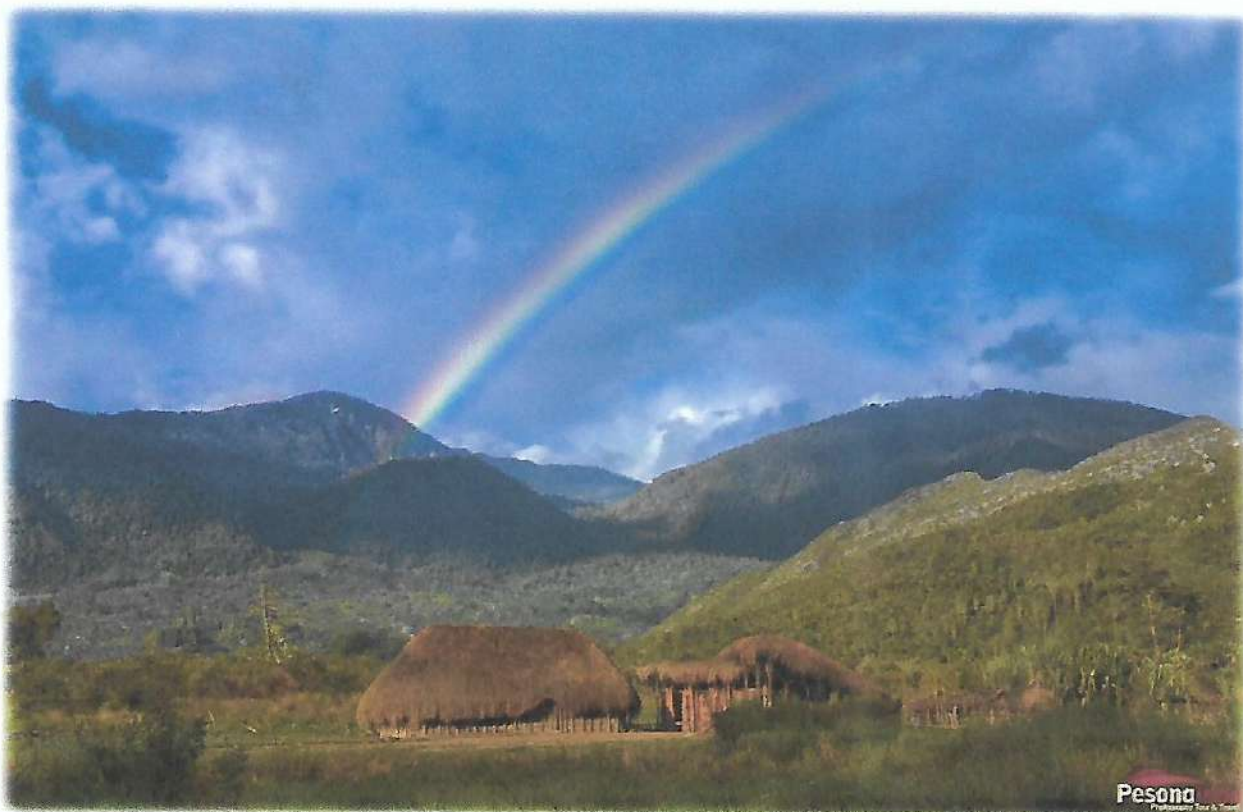




LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN APRIL TAHUN 2025



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak, S.H., M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo, S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S, Sos., M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan	14
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan	15
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan	18
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan	23
BAB III PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

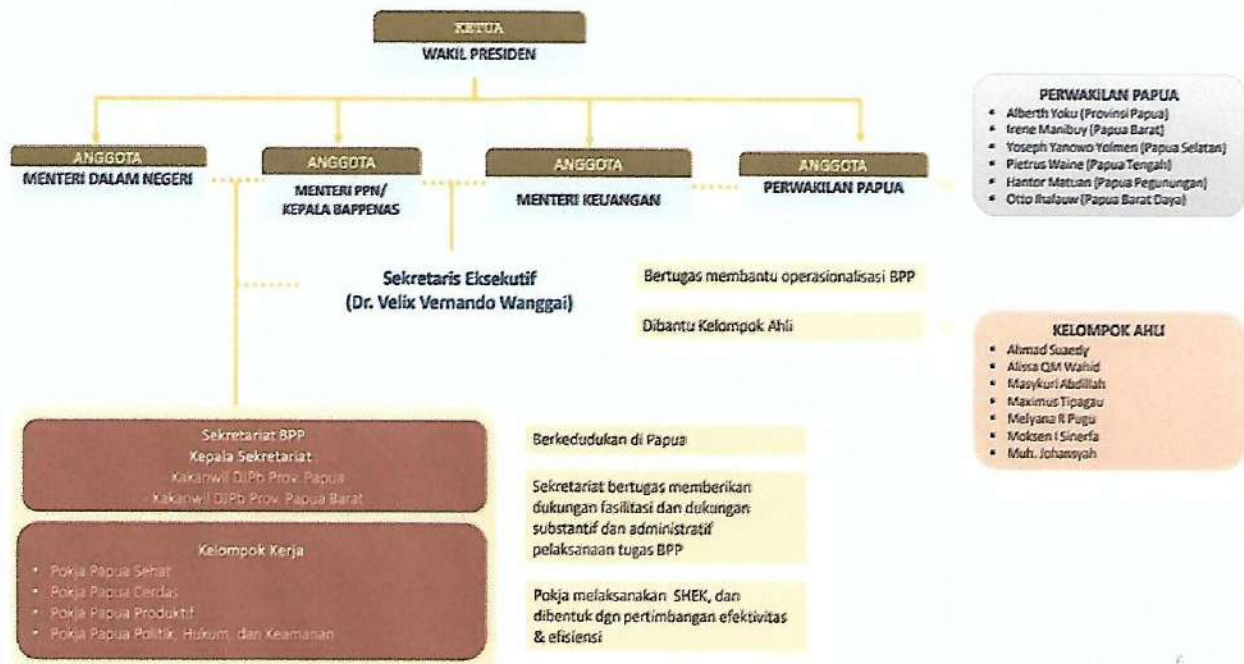
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

- Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya per Bulan April tahun 2025 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan,S.IP.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Ibadah HUT Pekabaran Injil Gereja Keman Injil Kingmi di Tanah Papua yang ke-71
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	22 April 2025, bertempat di Sapalek Kecamatan Napua Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mengikuti Ibadah HUT Pekabaran Injil di Lembah Balim ke-71 Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan,
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan Ibadah HUT Pekabaran Injil di Lembah Balim yang ke-71, berjalan baik dan lancar sesuai yang direncanakan oleh Panitia dengan hasil sebagai berikut: 1. Dari pihak PGGPP menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menetapkan tanggal 20 April di jadikan sebagai hari libur vaktual, maka setiap tahun kami akan rayakan ibadah HUT Pekabaran Injil di Lembah Baliem Provinsi Papua Pegunungan. 2. Pesan Pdt. Sofyan.S. Yoman, dalam khotbah mari kita bersama-sama mengambil komitmen untuk memberantas miras, lem aibon, narkoba, ganja, sex bebas yang akan berujung pada pembunuhan, maka masalah pembunuhan tidak boleh bayar kepala dengan mahar babi dan uang tapi pelaku pembunuhan di serahkan ke pihak berwajib dan di proses secara hukum yang berlaku di NKRI. 3. Bupati Jayawijaya mengajak umat Kristiani di PPP, mari kami bergandengan tangan membangun Jayawijaya dari sektor Pendidikan dan Kesehatan (sekolah dan puskesmas yang rusak), pihak gereja tidak membagnun gereja baru namun isi dan perbaiki gereja dan umat yang ada. 4. Anggota BP3OKP memesan, Pemerintah menjadi mitra lalu melihat gereja secara utuh. Kita harus merubah stigma di mana orang dari luar Papua melihat kita Papua Pegunungan itu tempat konflik dan perang suku namun

		jika kerja sama antara Gereja, Pemerintah dan Umat (tokoh-tokoh Masyarakat) kami dapat menciptakan damai, aman, nyaman dan Indah di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Anggota BP3OKP bersama Masyarakat distrik Napua mengenai Lokasi (Tanah) Milik Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya di Distrik Napua.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	24 April 2025, bertempat di Komplek Kantor Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Penyelesaian masalah sekaligus Klarifikasi Lokasi (tanah) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya di Distrik Napua.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Kepala Distrik dan masyarakat hak ulayat serta pihak masyarakat
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	Koordinasi

Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Pertemuan antara Kepala Distrik, Anggota BP3OKP, Kepala suku dan masyarakat hak ulayat serta pihak masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di atas tanah Pemda Kab. Jayawijaya dimaksud berjalan baik dan ada beberapa kendala antara lain: 1. Pihak pemerintah Distrik Napua dan Anggota BP3OKP Perwakilan PPP sebagai mantan Kepala Distrik telah menjelaskan proses kesepakatan sampai pada penanda tangannan Surat Pelepasan Hak Ulayat atas tanah sampai pada penerbitan sertifikat; 2. Dari pihak Kepala Suku dan masyarakat hak ulayat beserta pihak pelaku yang sedang melakukan aktivitas di atas tanah tersebut menyampaikan keberatan dan tidak mengakui atas sertifikat yang telah diterbitkan oleh pihak pertanahan yang mengatasnamakan Pemda Kab. Jayawijaya; 3. Akan ada pertemuan tindak lanjut karena hasil dari pertemuan ini Kepala Distrik selaku perwakilan dan penanggung jawab aset Pemda Kab. Jayawijaya akan melaporkan kepada Bupati Kabupaten Jayawijaya.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Seminar Sehari Pelayanan Anak dan Remaja Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan selama 1 hari, Sabtu tanggal 19 April 2025, jam 13:00 s.d selesai, mengambil Lokasi di Komplek misi CAMA di Piramid Kecamatan Piramid Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Seminar sehari dalam rangka penyegaran rohani kepada Anak-anak dan Remaja Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua Koordinator Jayawijaya Klasis Balim Tengah.
Peserta Kegiatan	:	Anggota BP3OKP, Ketua Koordinator Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Badan Pengurus Harian PAR (Pengurus Anak dan Remaja), Para Pengasuh sekolah minggu Klasis Balim Tengah dari 31 Jemaat, Anak-anak dan Remaja dari 31 Jemaat dari Klasis Balim Tengah.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan seminar berjalan dengan lancar, Bapak Hantor Matuan sebagai pemateri berterimakasih atas antusias dan kehadiran seluruh jemaat dan anak-anak serta remaja dari 31 jemaat klasis baliem Tengah, dalam kesempatan ini Bapak Hantor memberikan pemahaman mengenai kehidupan yang benar serta mengajak semua jemaat, anak-anak dan remaja untuk selalu mendekatkan diri dan setia pada ajaran dan perintah Tuhan.
Dokumentasi Kegiatan	:	



Kegiatan 4	
Nama Kegiatan	: Rapat Rutin Koordinasi Teknis Sekretariat DOB KPPN Wamena bersama BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: 23 April 2025, bertempat di Aula Kantor KPPN Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan sinergi
Peserta Kegiatan	: Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, Pokja BP3OKP, Staff BP3OKP, Sekretariat DOB KPPN Wamena.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	: Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	: BP3OKP
Hasil Kegiatan	: Rapat berjalan dengan lancar, Bapak Amran Sakiran selaku PPK BPP Papua Pegunungan mengharapkan anggaran yang ada dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan dengan adanya anggaran untuk BPP ini dapat mendorong Anggota BPP dan pokja untuk melaksanakan Program Kerja yang sudah di susun dalam RKP, selain itu juga Anggota Badan Pengarah Papua Pegunungan, Bapak Hantor Matuan mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat BPP dalam hal ini KPPN Wamena yang sudah banyak membantu administrasi BPP dan diharapkan kerjasama yang baik antar Sekretariat dan BPP Provinsi Papua Pegunungan dan mengharapkan untuk seluruh pokja dapat melaksanakan program, tugas dan fungsinya masing-masing.

Dokumentasi
Kegiatan

:



2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Fransiscus Elosak, S.H.,M.H

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	NIHIL
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S.Sos.,M.Si

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Harmonisasi dan sidak bagi sekolah-sekolah yang menolak dan menerima program makan bergizi gratis.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	7 s.d. 8 April 2025, bertempat di Sekolah Yayasan Nurul Hidayah dan Al Istiqomah Yapis Walesi.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Membahas Penyaluran MBG yang belum bisa berjalan Normal dan menyeluruh karena Faktor kurangnya Persiapan di semua Lini. 2. Membahas rencana Sosialisasi ke penerima/Penyelenggara MBG dan semua sekolah dari tingkat PAUD sampai SMA belum berjalan Baik.
Peserta Kegiatan	:	Kepala Sekolah, Guru, tenaga TU dan Dinas Pendidikan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Program MBG antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Sekolah - Sekolah agar MBG bisa berjalan dan tepat sasaran. 2. Kurangnya Koordinasi dan persiapan di semua lini sehingga Program MBG belum berjalan dengan baik. 3. Sinkronisasi, Harmonisasi dan koordinasi Dari penyelenggara Dapur MBG belum bisa diterima Penerima Program MBG diseluruh 8 Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. 4. Pemerintah dan Tim BGN / TIM MBG juga penerima MBG harus koordinasi lebih baik lagi.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Pimpinan Program Makan Bergizi Gratis MBG Papua Pegunungan bersama Pokja Papua Produktif BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	24 April 2025 pukul 14.00 s.d. selesai, bertempat di salah satu Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jayawijaya,
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Tujuan menghadirkan para pelaku ekonomi kreatif orang asli papua dengan maksud agar Program makan bergizi gratis ini dapat melibatkan orang-orang asli papua khususnya di Wamena untuk dapat bergabung dan bekerja sama membawa hasil kebun di Jayawijaya,
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Produktif, Staff BP3OKP, Ketua Program MBG, Penanggungjawab Dapur MBG, Perwakllilan Gekraf yang bergerak dibidang pertanian.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi.
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	1. Anggota kelompok kerja Papua Produktif BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan mengadakan rapat internal untuk mengusulkan para pelaku Ekonomi Kreatif orang asli papua dalam bidang pertanian untuk dapat dilibatkan dalam Program MBG agar Program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa/siswi yang merasakan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah tapi juga bagi para pelaku ekonomi kreatif terutama di bidang pertanian orang asli papua. 2. Pak Maman selaku Ketua/penanggung jawab dapur Makan Bergizi Gratis menerima dan siap bekerja sama dengan para pelaku ekonomi kreatif dibidang pertanian dan sangat mengharapkan bantuan penyediaan bahan sayur-sayur dan buah-buahan dengan jumlah yang banyak dan harga yang terjangkau. 3. Para pelaku ekonomi kreatif dalam bidang pertanian siap bekerja sama dan akan menyediakan kebutuhan dapur Makan Bergizi Gratis berupa sayur-sayuran maupun buah-buahan dan akan menyesuaikan harga pasaran yang dibutuhkan oleh dapur MBG

Dokumentasi Kegiatan	:	 
----------------------	---	--

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Rencana Kejuaraan Nasional Taekwondo Papua Open 2025.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	28 April 2025, bertempat di Cafe Anggrek
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Mempersiapkan Kodispora Provinsi untuk menjaring bibit atlet daerah terutama cabang Taekwondo. 2. Menunjang berdirinya poksi dan KONI Provinsi untuk mencetak dan meningkatkan atlet muda dan berkualitas 3. Membahas persiapan PON beladiri dikudus tahun 2025.
Peserta Kegiatan	:	Ketua KONI, PJ Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Pengurus KONI, Ketua dan pengurus PB Taekwondo Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dispora bekerjasama dengan Koni untuk dapat mencetak

		dan mengkaderkan atlet-atlet taekwondo yang berpartisipasi mewakili Papua Pegunungan 2. Mensinkronkan pemerintah, Koni dan Popsi dalam menyiapkan atlet muda Taekwondo untuk mengikuti dan mempersiapkan kejuaraan level nasional bahkan internasional.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Rapat kerja Pokja Papua Cerdas bersama Kepala Dinas P&P Provinsi Papua Pegunungan dan Yayasan Cakra dalam Program sekolah alam, Makan bergizi dan Pendidikan life skill terintegrasi dalam budaya lokal.

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	28 April 2025, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Rapat bertujuan untuk membahas Program sekolah alam, Makan bergizi dan Pendidikan life skill terintegrasi dalam budaya lokal bagi anak-anak asli Papua.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Cerdas, Kepala Dinas P&P, Yayasan Cakra.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	Hingga saat ini Program sekolah alam, Makan bergizi dan Pendidikan life skill terintegrasi dalam budaya lokal sudah berjalan dengan lancar dan baik di tiga Lokasi di Kabupaten Jayawijaya yaitu di daerah Hetigima, Kurulu dan Walaik. Antusias dan semangat anak-anak yang tergabung dalam program ini patut di apresiasi dan harus di laksanakan di daerah-daerah lain di Provinsi Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan sekaligus terlibat dalam kegiatan belajar anak-anak di Sekolah Alam Bakti Toleransi
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	30 April 2025, bertempat di Sekolah Alam Bakti Toleransi.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan memberikan pemahaman bagi anak-anak asli Papua sejak dini mengenai pentingnya Pendidikan bagi masa depan.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua cerdas, Yayasan cakra dan siswa-siswi Sekolah Alam Bakti
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Kunjungan sekaligus terlibat dalam kegiatan belajar, makan bergizi yang dikelola oleh orang tua siswa-siswi dari hasil kebun sendiri ini dihadiri oleh banyak siswa siswi bahkan orangtua murid yang ikut antusias menyambut program ini di Sekolah Alam Bakti Toleransi, dalam menyampaikan materi Bapak Paul Wetipo selaku Pokja Papua Cerdas BP3OKP menyampaikan bahwa Tanah Papua anak baik atau tidak tergantung Pendidikan, maka Pak Paul mengajak semua siswa siswi untuk tetap bersemangat dan berjuang demi Pendidikan untuk masa depan Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	



Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dengan masyarakat pemilik wilayah Program Sekolah Alam di selenggarakan di Putagaima Hetigima
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	30 April 2025, bertempat di Putagaima Hetigima.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan Koordinasi bersama masyarakat pemilik wilayah program sekolah alam untuk memastikan Lokasi ini siap dan aman untuk di gunakan sebagai Lokasi anak-anak papua menuntut ilmu.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Cerdas, Yayasan Cakra dan Masyarakat pemilik Wilayah.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	:	Koordinasi yang dilakukan bersama dengan Masyarakat pemilik Wilayah ini agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan salah satu pihak, dan untuk memastikan bahwa Lokasi ini siap dan aman untuk menjadi Lokasi anak-anak menuntut ilmu dan membangun Papua Pegunungan yang lebih baik.

Dokumentasi
Kegiatan

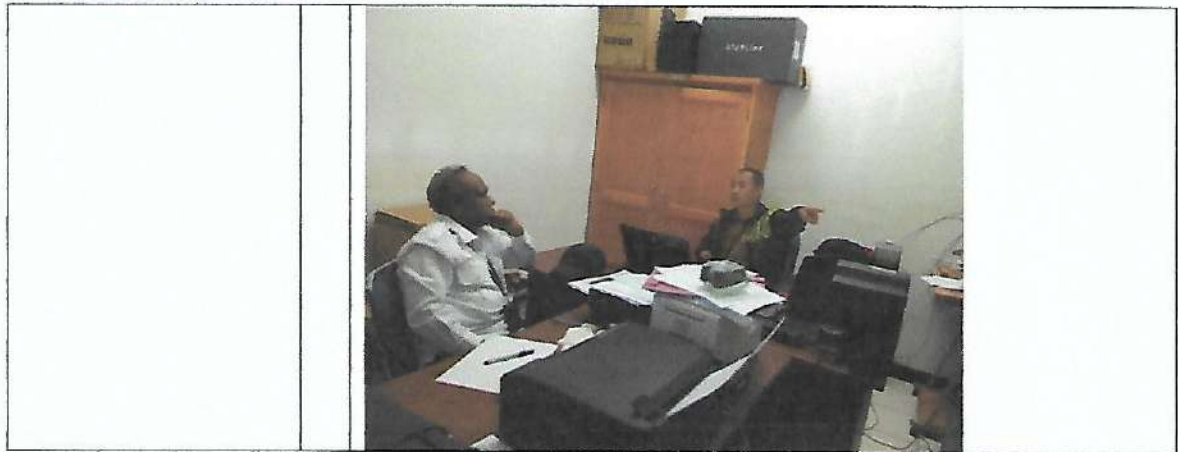
:



2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Gaad Piranid Tabuni, SP., M.M)

Kegiatan 1	
Nama Kegiatan	: Rapat Koordiansi BPP Provinsi Papua Pegunungan Pokja Papua Sehat Bersama Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: 25 April 2025, bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Dukcapil Kabupati Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Membahas mengenai Data Penduduk Kabupaten Jayawijaya untuk program Khusus Data Penduduk bagi Orang Asli Papua.
Peserta Kegiatan	: Pokja Papua Sehat, Staff BP3OKP, Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	: Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	: Berdasarkan rapat ini didapatkan hasil bahwa, untuk pengurusan data penduduk bagi OAP dana dari Dinas Dukcapil tidak mencukupi, karena sudah dialokasikan sesuai APBD. Ini merupakan target yang harus dikejar pada tahun ini, untuk saat ini dinas dukcapil bersedia jika ada penambahan anggaran bagi dinas dukcapil untuk pelayanan perekaman ke masyarakat di distrik-distrik. Penambahan data Penduduk untuk OAP akan terus dikawal untuk tahun 2025 oleh pemerintah daerah dan akan diadakan rapat lanjutan terkait hal ini untuk mendapat keputusan akhir.
Dokumentasi Kegiatan	: 



Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rapat Bupati Kabupaten Jayawijaya bersama dengan pihak 17 Denominasi Gereja.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	30 April 2025, bertempat di Ruang Kerja Bupati Kabupaten Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan ini bertujuan untuk membantu korban bencana banjir di Kabupaten Jayawijaya terkhusus di 17 denominasi Gereja di Kabupaten Jayawijaya.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Sehat, Bupati Kabupaten Jayawijaya, perwakilan 17 Denominasi Gereja.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Koordinasi dan Evaluasi.
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	1. Bupati Jayawijaya meminta untuk masing-masing gereja melaksanakan doa bersama di sasana wio kantor bupati dan di masing-masing gereja mengenai musibah banjir di Kabupaten Jayawijaya 2. Bupati meminta pihak 17 denominasi gereja untuk mengamati dan memantau lokasi dan korban banjir di Kabupaten Jayawijaya 3. Menindaklanjuti permasalahan bencana banjir bersama pokja Papua sehat pada tanggal 30 s.d.

Dokumentasi
Kegiatan

:



BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

**Wamena, 8 Mei 2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**



Hantor Matuan, S.IP.